



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas karunia serta ridho-Nya, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen laporan dalam mengukur capaian kinerja yang merupakan tindak lanjut dari LAKIP – SK LAN No. 239 Tahun 2003 Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017 ini disajikan dalam 4 (empat) Bab. Pada prinsipnya substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menyajikan tentang tingkat capaian kinerja utama dan sasaran yang di capai dalam Renstra.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik ditinjau dari cara penyusunan, materi hasil kinerja dan sasaran yang disajikan masih belum sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari pihak yang terkait yang sifatnya membangun untuk menjadi perhatian dan perbaikan di masa yang akan datang, sehingga kami dapat meningkatkan kinerja dan kualitas penyusunan.

Semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun pelaksanaan kinerja yang optimal.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2018

**Plt. KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN**

Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM

Pembina (IV/a)

NIP.19631124 200112 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Kerja Tahun 2017.

Penyusunan LAKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dan mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2012-2017, maka Badan Penghubung telah melaksanakan 4 (empat) program dalam periode tahun 2012-2017.

Adapun visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten pada Periode Tahun 2012-2017 adalah “HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SEBAGAI JEMBATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PROMOSI BANTEN UNTUK MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Sedangkan dalam mewujudkan suatu Visi Badan Penghubung Provinsi Banten 2012 - 2017 digunakan suatu Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
3. Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatkan Promosi dan Investasi Daerah;

5. Meningkatkan Informasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatkan fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Badanr Penghubung Daerah Provinsi Banten dan mewujudkan tata kelola pemerintahan *Good Governance* yang dituangkan kedalam misi RPJMD urusan pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Indikator capaian kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah 1 (satu) Bidang Urusan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah pada tahun 2017 yaitu Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dengan Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah adalah Pengelolaan Sistem Layanan Informasi. Program dan indikator tersebut merupakan Program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2012 – 2017 dengan target 100% untuk 5 tahun. Indikator kinerja tersebut sasarannya adalah untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi dengan indikator kinerja Rasio Kemandirian Daerah Target Tahun 2017 dengan Outcam Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 90 Impac IPM 75,69, LPE 6,80, PPT 8,24 PPM 4,8.

Kegiatan dalam Renja Tahun 2017 :

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 6) Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 7) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat
- 9) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- 10) Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten
- 11) Promosi Produk Potensi Unggulan Daerah Dan Investasi
- 12) Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII
- 13) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Tujuan pada sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1). Meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Meningkatkan Promosi dan Investasi Daerah penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Meningkatkan Informasi penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Meningkatkan fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan kebijakan pada periode 2012 – 2017 Badan Penghubung Daerah Banten menetapkan strategi pada setiap misi sebagai berikut :

1. Pencapaian misi Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur (misi ke 1) akan ditempuh melalui penerapan strategi “Penataan Manajemen dan Sumber Daya Organisasi Kantor Penghubung Provinsi Banten”
2. Pencapaian misi Meningkatkan hubungan kerjasama penyelenggaraan pemerintahan (misi 2) akan ditempuh melalui penerapan strategi “Perluasan akses dan pemeliharaan keberlanjutan jaringan antar lembaga;
3. Pencapaian misi Meningkatkan promosi penyelenggaraan pemerintahan (misi 3) akan ditempuh melalui penerapan strategi “Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan fasilitasi promosi daerah”.
4. Pencapaian misi Meningkatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan (misi 3) akan ditempuh melalui penerapan strategi “Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan fasilitasi informasi daerah”;
5. Pencapaian misi Meningkatkan Pelayanan Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (misi 4) akan ditempuh melalui penerapan strategi “Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Kelembagaan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
2.1 Visi	23
2.2 Misi	24
2.3 Tujuan	25
2.4 Sasaran Strategis	27
2.5 Penetapan Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Pengukuran Indikator Kinerja	32
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	38
3.3 Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV PENUTUP	60



BAB I PENDAHULUAN

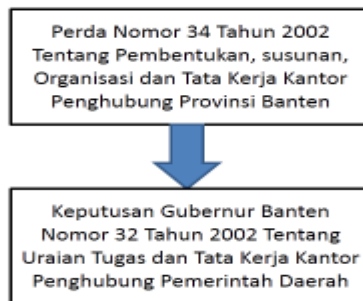
1.1. LATAR BELAKANG

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jakarta dengan posisi yang sangat strategis sebagai penyangga ibukota disamping sebagai etalase dan *show windowsnya* juga sebagai duta Banten di Jakarta . Lahirnya Provinsi Banten berawal terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten latar belakang berdirinya Provinsi Banten dapat digambarkan secara kronologis dalam tabel sebagai berikut :



Kemudian lahirlah Kantor Penghubung Provinsi Banten atas buah pikiran dan cita-cita, serta kepentingan masyarakat dan kedinasan kemudian dibuat kajian dan rumusan selanjutnya dibentuklah dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut :

LAHIRNYA KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN



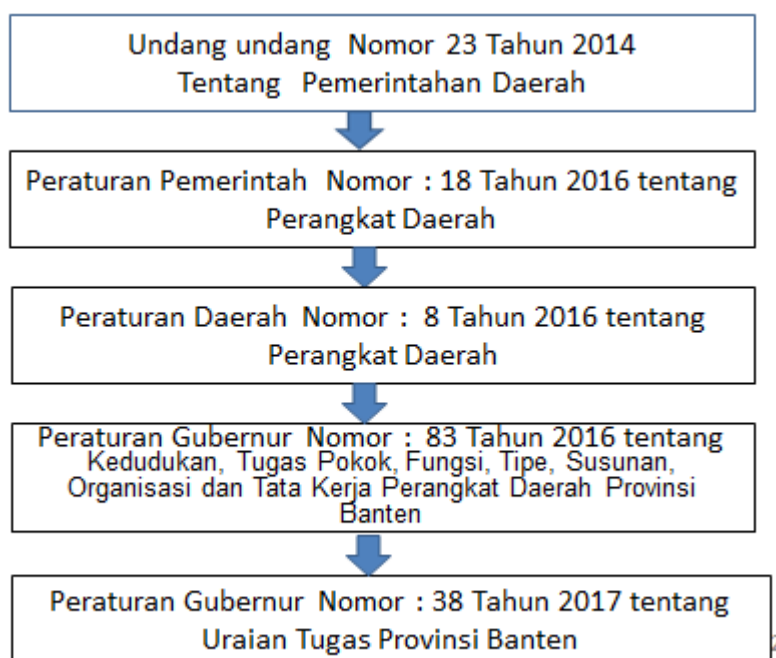
Selanjutnya dirubah dengan Peaturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan peraturan sebagai berikut :



Kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor :



Selanjutnya dirubah berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 dengan turunannya sebagai berikut :



Badan Penghubung Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi.

Kekhususan Badan Penghubung adalah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, daerah provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara

Badan Penghubung Daerah adalah lembaga yang berkedudukan di Jakarta (Ibukota Negara) dengan posisi yang sangat strategis sebagai penyangga ibukota disamping sebagai etalase dan *show windows*nya juga sebagai duta Banten di Jakarta .

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tersebut Badan Penghubung Daerah melaksanakan tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan antarlemaga.

Pada saat ini Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri, mempunyai beban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas kegiatan rutin dan pelaksanaan program serta pelayanan, baik bersifat fungsional maupun sektoral dari tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah satu materinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan

pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan Program-program Strategis perlu membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program kinerja tersebut.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi serta peranan dalam pengelolaan sumber daya, kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berpijak pada aturan yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP– SK LAN NO.239 TH 2003, Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006, PERMENPAN NO.29 Tahun 2010.

Inpres dan aturan lainnya mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangann pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pada akhirnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2017 menjadi bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja .

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LAKIP yaitu untuk memenuhi kewajiban amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten setiap akhir kegiatan serta permasalahan yang dihadapi dengan harapan dapat menjadi bahan pengukuran tingkat keberhasilan kinerja dan untuk mengetahui capaian kinerja sebagai berikut :

- 1). Kegiatan yang telah dilaksanakan;
- 2). Perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
- 3). Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- 4). Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
- 5). Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.3 KELEMBAGAAN

a. Struktur Organisasi

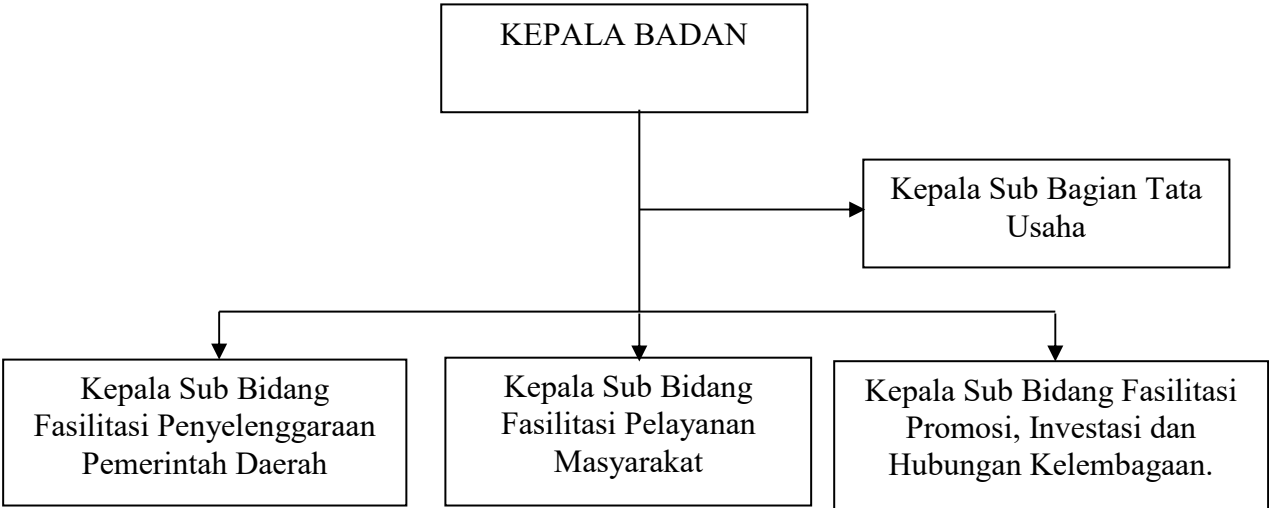
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016

tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Kepala Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4. Kepala Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat;
- 5. Kepala Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

Dengan digambarkan struktur organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten secara diagramatis sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Daerah Banten
Setingkat Eselon III a



Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penghubung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

1. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;
4. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 bahwa uraian tugas Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah berdasarkan rencana strategis Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Fasilitas Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Banten di Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten, Data dan Informasi, Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;
7. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan umum dan rumah tangga;
8. Menyelenggarakan Pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;
9. Menyelenggarakan Pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;
10. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
11. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data;

13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan Penghubung Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 5. Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup Badan Penghubung Daerah;
7. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi aset badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis Badan Penghubung Daerah, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
9. Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. Menyenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Badan Penghubung Daerah;
11. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan Penghubung Daerah;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Penghubung Daerah;
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

- a. Kepala Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 5. Menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaan;
 6. Melaksanakan fasilitas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah di luar daerah Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitas apabila diminta oleh DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Banten di Jakarta;

7. Melaksanakan fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;
8. Mengoordinasikan kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
9. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat

- a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menginventarisasi, mensistematiskan, menganalisis dan menyajikan data dan informasi masyarakat Banten se-Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten;
6. Melaksanakan Fasilitasi pelayanan masyarakat Banten di Jabodetabek;
7. Melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa asal Banten di luar daerah Provinsi Banten;
8. Melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan mahasiswa Banten di luar daerah Provinsi Banten;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan :

- a. Kepala Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaannya;
6. Mengoordinasikan, menginformasikan dan mengolah data tentang promosi, Investasi, Kelembagaan dan informasi daerah;
7. Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan-pertemuan para calon investor baik dalam maupun luar negeri;
8. Melaksanakan pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;

9. Memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan pariwisata melalui media cetak dan elektronik;
10. Melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan Perangkat Daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Banten;
11. Melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
12. Melaksanakan fasilitasi pelestarian seni budaya Banten di Anjungan Daerah Banten Taman Mini Indonesian Indah;
13. Melaksanakan koordinasi fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian Banten yang diselenggarakan di luar daerah Provinsi Banten;
14. Mengoordinasikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;
15. Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah dengan Lembaga Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hingga tahun 2017, Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten didukung oleh 48 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 22 orang Tenaga Kerja Sementara (TKS). Dari 25 orang pegawai yang berstatus ASN terdistribusi dalam 2 orang pegawai dengan golongan ruang IV, 19 orang pegawai dengan golongan ruang III, serta 4 orang pegawai dengan golongan ruang II.

Berdasarkan jumlah jabatan struktural, hingga tahun 2017 dari 5 eselon yang tersedia telah terisi sepenuhnya, dimana hal ini mencerminkan tugas-tugas pada satuan organisasi telah terdistribusi secara optimal. Hingga tahun 2017, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang membawahi 10 pelaksana yang berstatus ASN, Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dengan 4 (empat) orang staf berstatus ASN, Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat 3 (tiga) orang staf berstatus ASN dan Sub Bidang Fasilitas Promosi 4 (empat) orang berstatus ASN, Kondisi tersebut dirasakan kurang mendukung pencapaian efektifitas terhadap pelaksanaan tugas pada tataran eselon IV, khususnya bila dikaitkan dengan beban tugas yang ada maupun kebutuhan dan keanekaragaman koordinasi, kerjasama dan pembinaan lembaga dan aktifitas promosi daerah yang perlu difasilitasi dan diselenggarakan setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten Menurut Golongan Ruang Tahun 2017

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEGAWAI (Orang)	KET
1	2	3	4
1	IV/E	-	
2	IV/D	-	
3	IV/C	-	
4	IV/B	-	
5	IV/A	2	
6	III/D	5	
7	III/C	2	
8	III/B	7	
9	III/A	5	
10	II/D	2	
11	II/C	1	
12	II/B	1	
13	II/A	-	
14	I/D	-	
15	I/C	-	
16	I/B	-	
17	I/A	-	
	JUMLAH	25	

Dengan keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung, masih perlunya pengembangan Sumber daya untuk

mendukung kinerja teknis Badan Penghubung sehingga diperlukan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang, dengan demikian dibutuhkannya peningkatan kompetensi pegawai untuk mendukung peranan Badan Penghubung yang begitu kompleks, baik melalui peningkatan status pendidikan maupun keahlian fungsional, sedangkan pada bidang kesekretariatan diperlukan juga peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, manajerial dan komunikasi.

Pada tahun 2017 Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Daerah menurut tingkat pendidikan :

Tabel 1.3
Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung
Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO .	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH PEGAWAI (Orang)	KET
1	2	3	4
1	DOKTORAL (S3)	-	
2	MAGISTER (S2)	5	
3	SARJANA (S1)	14	
4	DIPLOMA/AKADEMI (DIII)	2	
5	SMU/SMK	4	
6	SMP	-	
7	SD	-	
	JUMLAH	25	

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. Keberadaan kantor dan Wisma Banten berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya No. 51, sedangkan Anjungan Daerah berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Kedudukan dan kondisi kantor tersebut dirasakan sangat penting sebagai *front office*, sebagai Duta Banten di Jakarta, etalase, show windows Banten di Jakarta, keberadaan tersebut secara

rasional dapat berpengaruh terhadap pencitraan Pemerintah Provinsi Banten di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara .

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah wakil Banten di Jakarta diperlukan kerjasama stakeholders/lembaga Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta.

Keberadaan kantor saat ini, terdiri dari ruang utama yang meliputi ruang kerja 1 (satu) Sub Bag Tata Usaha, 3 Sub Bidang, Ruang Rapat, Media Center, Lobby, 2 toilet, 7 Kamar Wisma lantai 2, Ruang Makan Basement, Toilet, Pantry, Ruang Pimpinan, Mushola, Teras, Gudang, pos satpam, taman, dan termasuk tempat parkir roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) yang memuat 12 (dua belas) kendaraan. Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, tersedia perpustakaan mini serta perangkat audiovisual (TV, VCD, *in focus*, *handy came*, dan *wireless tape*).

Sebagai daya dukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur, sarana penunjang operasionalnya juga perlu diperhatikan, hal ini dianggap penting karena kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan maupun pelayanan sangat membutuhkan dukungan perangkat komputer, baik yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan pada Badan Penghubung Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi saat ini, jumlah perangkat komputer dan laptop yang tersedia kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dimana bila dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN yang berjumlah 25 orang. Dari jumlah sarana yang ada, hampir rata-rata kondisinya sudah kurang baik (rusak), termasuk kondisi printer.

Selanjutnya dalam mendukung kebutuhan mobilisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dan pelayanan fasilitasi pimpinan, hingga tahun 2017 tersedia sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 6 (enam) unit kendaraan roda empat (Innova, Toyota Kijang, Avanza, Xenia, Toyota Hlace). Keberadaan kendaraan roda empat, dalam masa-masa tertentu dirasakan kurang mencukupi.

Adapun daftar dan kondisi sarana Kendaraan Dinas aparaturnya di Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten hingga Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Kendaraan Roda 2 Sarana dan Prasarana
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 2 Honda Supra	1	Baik	Tahun 2003
2	Kendaraan Roda 2 Honda NF 125 TD	3	Baik	Tahun 2007
3	Kendaraan Roda 2 Honda Vario	1	Baik	Tahun 2009
4.	Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro	1	Baik	Tahun 2009
5.	Kendaraan Roda 2 Honda EF02N 12M2 A/T	3	Baik	Tahun 2015

Tabel 1.5
Daftar Kendaraan Roda 4 Sarana dan Prasarana
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Super KF 83 Long	1	Rusak Berat	Tahun 2003
2.	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova Type E	1	Baik	Tahun 2008
3.	Kendaraan Roda 4 Toyota Avanza Type E	1	Baik	Tahun 2008
4.	Kendaraan Roda 4 Daihatsu Xenia Type R	1	Baik	Tahun 2013
5.	Kendaraan Roda 4 Toyota Hi Ace	1	Baik	Tahun 2014

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
6.	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova Type G A/T	1	Baik	Tahun 2016

Keberadaan kendaraan roda empat dirasakan masih kurang mencukupi, khususnya pada saat terjadi beberapa agenda pelaksanaan tugas luar kantor pada hari yang bersamaan. Barang Sarana dan Prsarana secara rinci dapat diinformasikan terlampir.

d. Keuangan

Kebijakan umum belanja daerah merupakan langkah–langkah yang ditempuh untuk mengefisiensikan dan mengefektifitaskan belanja tidak langsung dan belanja langsung oleh seluruh OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan program pembangunan yang telah dijabarkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, Badan Penghubung Provinsi Banten mempunyai pemasukan berupa pendapatan retribusi dari sewa kamar wisma Banten. Target retribusi dari Wisma Banten pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 113.000.000,- , tidak ada perubahan target retribusi pada tahun 2017. Jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 90.850.000,- atau 80,40% dari target retribusi yang direncanakan dalam APBD-Perubahan.

Anggaran Belanja Tahun 2017 sebesar Rp. 11.913.240.000,- sedangkan Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 12.526.240.000,-. Anggaran Belanja terbagi dua yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2017 sebesar Rp. 4.149.000.000,- sedangkan anggaran Belanja Tidak Langsung

(BTL) Perubahan sebesar Rp. 4.762.000.000,-. Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2017 sebesar Rp. 7.764.240.000,- sedangkan anggaran Belanja Langsung (BL) Perubahan sebesar Rp. 7.764.240.000,-. Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Anggaran perubahan belanja pegawai pada Belanja Langsung (BL) Tahun 2017 sebesar Rp. 54.500.000,- , anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 7.476.440.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 233.300.000,-.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1 VISI Periode Tahun 2012- 2017 :

Badan Penghubung Daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaksana pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan yang diharapkan yaitu dengan “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”. Harapan tersebut tentunya dapat tercapai keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2012 – 2017.

Dalam upayanya untuk mencapai visi provinsi Banten menuju rakyat sejahtera, sangat diperlukan peran serta dan keberdayaan Kantor Penghubung, dalam menjalin hubungan kerja maupun kerjasama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat yang baik dapat mendorong untuk memajukan pembangunan di Provinsi Banten.

Seiring dengan harapan tersebut, Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten harus mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Banten periode 2012 – 2017, melalui penetapan visi kelembagaan yaitu Kantor Penghubung

Visi Kantor Penghubung Provinsi Banten 2012 - 2017 :

“HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SEBAGAI JEMBATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PROMOSI BANTEN UNTUK MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

VISI Periode Tahun 2017-2022 :

Visi Badan Penghubung pada periode Tahun 2017-2022 mengacu pada visi Provinsi yang telah diamanatkan oleh Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 bahwa tidak ada Visi Organisasi Perangkat Daerah yang ada adalah Visi Gubernur terpilih'

Periode Tahun 2017- 2022 visi Gubernur Banten terpilih adalah :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH.

2.2 MISI Periode Tahun 2012-2017 :

Dalam rangka mewujudkan Visi Kantor Penghubung Provinsi Banten 2012 - 2017 maka perlu ditetapkan Misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berkaitan dengan penetapan Misi Kantor Penghubung Provinsi Banten 2012 - 2017, maka perlu diperhatikan Misi Provinsi Banten 2012 – 2017 yang terkait dengan program daerah dan harus dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Provinsi Banten.

Untuk itu, Kantor Penghubung Provinsi Banten menetapkan Misi 2012 – 2017 :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
3. Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatkan Promosi dan Investasi Daerah;
5. Meningkatkan Informasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatkan fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

MISI Periode Tahun 2017 – 2022 :

Misi yang pertama yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) misi inilah yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung daerah dari 5 Misi Provinsi Banten yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

2.3 TUJUAN Periode Tahun 2012 – 2017 :

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah selama 5 tahun (2012 – 2017). Oleh karena itu penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan terjadi iklim yang kondusif serta mendorong terjadinya sinergisme.

Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan Kantor Penghubung yang akan dicapai untuk mewujudkan misi tersebut pada periode 2012 – 2017 Kantor Penghubung Provinsi Banten menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2012– 2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

- 1. Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya aparatur**

Misi tujuannya adalah meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi peran kelembagaan. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan;
- b) Tersedianya prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas;
- c) Meningkatnya kemampuan kualitas SDM aparat.

2. Misi 2 Meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan

Misi tujuannya adalah untuk meningkatkan jalinan kemitraan antara pemerintah Provinsi Banten dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan di capai adalah sebagai berikut:

- a. Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan anatr lembaga Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah pusat, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah lainnya;
- b. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
- c. Bertumbuhkembangnya partisipasi organisasi non pemerintah , lembaga swasta lainnya serta masyarakat Provinis Banten di Jakarta dan sekitarnya dalam penyelenggaraan pembangunan.

3. Misi 3 : Meningkatkan Promosi dan Investasi Daerah penyeleggaraan pemerintahan

Misi tujuannya adalah untuk menumbuhkembangkan persepsi dan minat pihak eksternal dalam mendorong dan memajukan pembangunan Provinsi Banten. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk promosi pariwisata daerah.
- b) Meningkatnya dukungan penyelenggaraan lvent promosi produk unggulan daerah.

4. Misi 4 : Meningkatkan Informasi penyelenggaraan pemerintahan

Misi tujuannya adalah untuk memberikan kebutuhan informasi pusat (di Jakarta) juga daerah (Banten) terhadap kedinasan dan masyarakat, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya layanan dan penyebaran informasi daerah dinas dan hasil pembangunan.

5. **Misi 5 : Meningkatkan fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.**

Misi ini tujuannya adalah meningkatkan pelayanan prima dalam fasilitasi terhadap pejabat daerah dan pusat serta terhadap SKPD untuk mendukung kedinasan di Jakarta sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan Dewan serta jajarannya yang sedang melaksanakan kedinasan di Jakarta.
- b. Terfasilitasinya pejabat Pusat yaitu Presiden, Wakil Presiden Pimpinan Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah.
- c. Meningkatnya pelayanan fasilitasi SKPD dalam dukungan kedinasan di Jakarta.

2.4 **SASARAN STRATEGIS Periode Tahun 2012-2017**

Strategi yang dilakukan dalam mendukung Program Pemerintah Provinsi Banten dengan memperkuat perekonomian dan strategi pemberdayaan masyarakat, dengan ditempuh perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan Strategi dan kebijakan Pada periode 2012 – 2017. Kantor Penghubung Banten menetapkan **strategis** pada setiap misi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan;
- b. Tersedianya prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas;
- c. Meningkatnya kemampuan kualitas SDM aparat;
- d. Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan anatr lembaga Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah pusat, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah lainnya;

- e. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
- f. Bertumbuhkembangnya partisipasi organisasi non pemerintah , lembaga swasta lainnya serta masyarakat Provinsi Banten di Jakarta dan sekitarnya dalam penyelenggaraan pembangunan.
- g. Meningkatkan layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk promosi pariwisata daerah.
- h. Meningkatkan dukungan penyelenggaraan event promosi produk unggulan daerah.
- i. Meningkatkan layanan dan penyebaran informasi daerah dinas dan hasil pembangunan.
- j. Meningkatkan pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan Dewan serta jajarannya yang sedang melaksanakan kedinasan di Jakarta.
- k. Terfasilitasinya pejabat Pusat yaitu Presiden, Wakil Presiden Pimpinan Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah.
- l. Meningkatkan pelayanan fasilitasi SKPD dalam dukungan kedinasan di Jakarta.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung Periode Tahun 2017 – 2022 :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	8	8	9
1	Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	60	70	75	80	88	90
		Pelayanan Publik Yang berkualitas	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100

Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Periode Tahun 2017 - 2022 :

Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnyakelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan pelayanan public yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standard operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
	Pelayanan Publik Yang berkualitas	Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Sertifikas	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan

2.5 PENETAPAN KINERJA

Dari Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten melaksanakan 4 program prioritas yang terintegrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan RPJMD dan Renstra Kantor Penghubung. Selanjutnya Kantor Penghubung melaksanakan Program dengan 12 indikator kinerja.

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu menjadi fokus permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yang sesuai dengan Tema Tahun 2017 yaitu **“Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”**

Untuk memperhatikan dan merespon pembangunan Tahun 2017 Provinsi Banten melaksanakan beberapa prioritas yaitu :

1. Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
3. Mengurangi Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah

Dari Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam penentuan Tema Pembangunan pada Tahun 2017 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk melaksanakan 3 Prioritas tersebut dengan melaksanakan 4 program yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Kapasotas Aparatur
3. Program Pembinaan Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
4. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten pada Periode Tahun 2012-2017 terdapat 1 (satu) indikator kinerja pada Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F.

Sasaran indicator utama yang termuat dalam Renstra adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan**
 - a. Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan anatr lembaga Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah pusat, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
 - c. Bertumbuhkembangnya partisipasi organisasi non pemerintah, lembaga swasta lainnya serta masyarakat Provinis Banten di Jakarta dan sekitarnya dalam penyelenggaraan pembangunan.

- 2) Meningkatkan Promosi dan Investasi Daerah penyeleggaraan pemerintahan :**
 - a. Meningkatkan layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk promosi pariwisata daerah;
 - b. Meningkatkan dukungan penyelenggaraan event promosi produk unggulan daerah.

- 3) Meningkatkan Informasi penyelenggaraan pemerintahan**
 Meningkatnya layanan dan penyebaran informasi daerah dinas dan hasil pembangunan.
- 4) Meningkatkan fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.**
- a. Meningkatnya pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan Dewan serta jajarannya yang sedang melaksanakan kedinasan di Jakarta.
 - b. Terfasilitasinya pejabat Pusat yaitu Presiden, Wakil Presiden Pimpinan Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah.
 - c. Meningkatnya pelayanan fasilitasi SKPD dalam dukungan kedinasan di Jakarta.

Tabel 3.1
 Indikator Utama Badan Penghubung :

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi	a Meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan	Renstra, Data dan Informasi
		b Meningkatkan Promosi dan Investasi Daerah penyeleggaraan pemerintahan	Renstra, Data dan Informasi
		c Meningkatkan Informasi penyelenggaraan pemerintahan	Renstra, Data dan Informasi
		a Meningkatkan fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Renstra, Data dan Informasi

Tabel 3.2
 Indikator Tujuan Sasaran Badan Penghubung pada Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2012 – 2017 :

NO	Indikator	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kinerja pada awal periode RPJMD						
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Pengelolaan Sistem layanan Promosi dan Informasi Daerah dan Pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------	------	------	------

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel 3.3 disajikan capaian kinerja Badanr Penghubung Provinsi Banten beserta persentase pencapaiannya.

Tabel 3.3

Perkin

: Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

Tahun Anggaran

: 2017

Program / Kegiatan & Tolok Ukur	BELANJA		HASIL KELUARAN		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan
2	3	4	6	7	8
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset - Updating Aplikasi Sistem Keuangan pada Simda Keuangan - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP	60,672,000 24,060,000 36,612,000	56,913,000 21,440,000 35,473,000	100 % pada tahun 2017 1 dokumen 4 dokumen	93.80 89.11 96.89	100 % pada tahun 2017 dokumen dokumen
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Penyusunan Laporan Kinerja - Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Forum Renja - Penyusunan Renstra Badan Penghubung - Penyusunan Pengendalian Evaluasi Laporan Kegiatan	171,000,800 6,405,000 66,783,000 36,360,000 61,452,800	124,227,200 6,000,000 53,801,000 33,200,000 31,226,200	100 % pada tahun 2017 3 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	72.65 93.68 80.56 91.31 50.81	100 % pada tahun 2017 dokumen dokumen dokumen dokumen
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	233,300,000 195,000,000 25,000,000 13,300,000	231,200,000 193,150,000 25,000,000 13,050,000	100 % pada tahun 2017 1 unit 1 unit 2 unit	99.10 99.05 100.00 99.73	100 % pada tahun 2017 unit unit unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Gedung dan Halaman - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	381,875,000 140,665,000 194,450,000 46,760,000	364,691,910 139,600,000 178,547,510 46,544,400	100 % pada tahun 2017 12 bulan 12 bulan 12 bulan	95.50 99.24 91.82 99.54	100 % pada tahun 2017 bulan bulan bulan

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1,946,674,200	1,807,811,151	100 % pada tahun 2017	92.87	100 % pada tahun 2017
- Penyediaan Jasa Perkantoran (non-PNS)	585,000,000	585,000,000	12 bulan	100.00	bulan
- Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK)	412,310,200	404,631,549	12 bulan	98.14	bulan
- Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	163,950,000	163,050,000	12 bulan	99.45	bulan
- Penyediaan Makan Minum Kantor	338,514,000	256,726,200	12 bulan	75.84	bulan
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	94,800,000	92,674,000	12 bulan	97.76	bulan
- Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan internet	205,200,000	168,121,402	12 bulan	81.93	bulan
- Promosi dan Publikasi	61,500,000	61,178,000	12 bulan	99.48	bulan
- Penyediaan BBM	85,400,000	76,430,000	12 bulan	89.50	bulan
5 Peningkatan Kapasitas Aparatur	44,682,000	39,433,000	100 % pada tahun 2017	88.25	100 % pada tahun 2017
- Administrasi Kepegawaian	1,252,000	1,252,000	1 dokumen	100.00	dokumen
- Peningkatan Kompetensi Aparatur	34,668,000	29,464,000	1 dokumen	84.99	dokumen
- Penyusunan Standar Teknis kegiatan SKP TA.2018	8,762,000	8,717,000	1 dokumen	99.49	dokumen
6 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	1,986,350,000	1,505,092,496	100 % pada tahun 2017	99.33	100 % pada tahun 2017
- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	249,750,000	169,618,235	12 bulan	100.00	bulan
- Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1,736,600,000	1,335,474,261	12 bulan	99.32	bulan
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum					
1 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	385,505,000	361,583,000	100 % pada tahun 2017	93.79	100 % pada tahun 2017
- Sarasehan Masyarakat Banten Se-Jabodetabek	184,955,000	179,418,000	1 dokumen	97.01	dokumen
- Pembinaan Mahasiswa Asal Banten dan Kongres Mahasiswa Banten	64,740,000	53,300,000	1 dokumen	82.33	dokumen
- Kerjasama Kreatifitas Seni Budaya Mahasiswa	135,810,000	128,865,000	1 dokumen	94.89	dokumen
2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	200,000,000	189,088,810	100 % pada tahun 2017	94.54	100 % pada tahun 2017
- Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, dan Tamu	193,846,000	183,899,810	12 bulan	94.87	bulan
- Fasilitasi Event Nasional /internasional , kerjasama Pemda, kegiatan Kementerian	5,982,000	5,017,000	4 kegiatan	83.87	kegiatan
- Fasilitasi Gubernur, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu Pada Event Kerjasama Pemda Kegiatan MPU, APSI dan Lainnya	172,000	172,000	1 kegiatan	100.00	kegiatan
3 Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten	926,286,000	885,833,500	100 % pada tahun 2017	95.63	100 % pada tahun 2017
- Pemutakhiran website dan E-Kios Badan Penghubung Provinsi Banten	24,724,000	24,534,000	2 Bulan	99.23	Bulan
- Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Buletin	191,254,000	183,234,000	4 Edisi	95.81	Edisi
- Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Booklet	219,954,000	214,801,500	10.266 Exp	97.66	Eksemplar
- Publikasi Informasi Banten Melalui Kerjasama	80,054,000	55,534,000	12 Bulan	69.37	Bulan

	Penayangan berita di media massa Daerah/lokal	410,300,000	407,730,000	2 Bulan	99.37	Bulan
4	Promosi Produk Potensi Unggulan Daerah Dan Investasi	589,395,000	528,497,900	100 % pada tahun 2017	89.67	100 % pada tahun 2017
	- Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek	124,036,000	115,476,000	3 event	93.10	event
	- Partisipasi dalam HUT Banten	150,301,000	137,483,900	2 event	91.47	event
	- Pentas Seni di Event Nasioanl dan Regional	142,516,000	124,806,000	2 event	87.57	event
	- Pentas Seni Budaya dan kerjasama Promosi dengan mahasiswa Banten di Yogyakarta	58,088,000	52,708,000	1 event	90.74	event
	- Kegiatan Fasilitas Forum Bisnis	114,454,000	98,024,000	1 event	85.64	event
5	Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII	743,000,000	692,152,000	100 % pada tahun 2017	93.16	100 % pada tahun 2017
	- Paket Acara Khusus Anjungan Banten di TMII (HUT Banten di TMII)	185,714,000	179,214,000	1 kegiatan	96.50	kegiatan
	- Festival Kuliner khas Daerah dan Pameran Expo Nusantara	23,128,000	19,944,000	2 kegiatan	86.23	kegiatan
	- Pawai Budaya Nusantara	72,714,000	72,694,000	1 kegiatan	99.97	kegiatan
	- Gelar Citra Budaya Tradisi	59,464,000	59,444,000	1 kegiatan	99.97	kegiatan
	- Parade Tari Nusantara	37,714,000	37,694,000	1 kegiatan	99.95	kegiatan
	- Karnaval Prajurit	72,714,000	72,694,000	1 kegiatan	99.97	kegiatan
	- Bulan Promosi 8 Kab/Kota di TMII	93,856,000	69,366,000	4 kegiatan	73.91	kegiatan
	- Pelestarian Seni Budaya Banten di anjungan	59,614,000	57,414,000	1 kegiatan	96.31	kegiatan
	- Rapat Koordinasi Festival Seni Budaya Banten di TMII	29,858,000	29,838,000	2 kegiatan	99.93	kegiatan
	- Partisipasi Pameran Nusantara Expo dan Forum di TMII	81,724,000	67,350,000	1 kegiatan	82.41	kegiatan
	- Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan	26,500,000	26,500,000	12 kegiatan	100.00	kegiatan
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	95,500,000	88,760,000	100 % pada tahun 2017	92.94	100 % pada tahun 2017
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	95,500,000	88,760,000	1 dokumen	92.94	dokumen

Tabel 3.4
Realiasi Indikator Kinerja
OPD : Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Stratgeis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			Realisasi		
1	2	3	4		
1	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi :	100	100	%
		Pengelolaan Layanan Informasi			

		Promosi Banten :			
		Pemutakhiran Website dan E-Kios Badan Penghubung Provinsi Banten	2	2	Bulan
		Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Buletin	4	4	Edisi
		Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Booklet	10265	10265	Exp
		Publikasi Informasi Banten Melalui Kerjasama Penayangan Berita di Media Massa Daerah	12	12	Bulan
		Publikasi Informasi Banten Melalui Kerjasama di Media Elektronik	2	2	Bulan
		Fasilitasi Promosi produk dan potensi Unggulan Daerah			
		Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek	3	3	Event
		Partisipasi Dalam Rangka HUT Banten	2	2	Event
		Pentas Seni di Event Nasional dan Regional	2	2	Event
		Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi dengan Mahasiswa Banten di Jogjakarta	1	1	Event
		Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII			
		Gelar Citra Budaya Tradisi	1	1	Kegiatan
		Pawai Budaya Nusantara	1	1	Kegiatan
		Parade Tari Nusantara	1	1	Kegiatan
		Karnaval Prajurit	1	1	Kegiatan
		Festival Kuliner Khas Daerah dan Pameran Expo Nusantara	2	2	Kegiatan
		Paket Acara Khusus Anjungan Banten pada Rangkaian HUT Banten di TMII	1	1	Kegiatan
		Bulan Promosi 8 Kab/Kota di TMII	4	4	Kegiatan
		Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan	1	1	Kegiatan
		Rapat Koordinasi Kegiatan Anjungan Banten di TMII	2	2	Kegiatan
		Partisipasi Pameran Nusantara Expo dan Forum di TMII	1	1	Kegiatan
		1 Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan	12	12	Bulan
		Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat			
		Sarasehan Masyarakat Banten se-Jabodetabek	1	1	Laporan
		Pembinaan Mahasiswa Asal Banten dan Kongres Mahasiswa Banten	1	1	Laporan
		Kerjasama Kreatifitas Seni Budaya Mahasiswa	1	1	Laporan

		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
		Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu	12	12	Bulan
		Fasilitasi Event Nasional / Internasional, Kerjasama Pemda Kegiatan Kementerian	4	4	Kegiatan
		Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu pada Even Nasional kerjasama Pemda, Kegiatan MPU, APPSI dan Lainnya	1	1	Kegiatan

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama Badan Penghubung Provinsi Banten adalah sebesar 100% karena target pengukuran dari setiap tahunnya. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Kantor Penghubung.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penghubung Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Perencanaan Strategik merupakan awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten kooptasi integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan yang strategis. Analisa terhadap lingkungan Badan Penghubung Daerah baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/kendala yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Badan Penghubung Daerah.

Dengan visi dan misi, serta strategi yang jelas dan tepat maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dapat meselaraskan potensi , peluang

dan kendala yang dihadapi . Perencanaan strategik yang dilanjutkan dengan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja menjadikan tolok ukur yang penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja kantor Penghubung Provinsi Banten.

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, karena itu dengan segala kemampuan daya dan upaya Kantor berusaha untuk melaksanakan pengukuran dan evaluasi yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pengukuran kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijaksanaan .

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung yang tertuang dalam Indikator Kinerja sasaran RPJMD yaitu Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi pada Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum dengan 5 (lima) kegiatan dengan anaïisis hasil capaian kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten :

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum				

Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100
	Pemutakhiran Website dan E-Kios Badan Penghubung Provinsi Banten	100	Pemutakhiran Website dan E-Kios Badan Penghubung Provinsi Banten	100
	Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Buletin	100	Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Buletin	100
	Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Booklet	100	Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Booklet	100
	Publikasi Informasi Banten Melalui Kerjasama	100	Publikasi Informasi Banten Melalui Kerjasama	100
	Penayangan berita di media massa Daerah/lokal	100	Penayangan berita di media massa Daerah/lokal	100

Pada tahun 2017 Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten yang teranggarkan sebesar Rp. 926.286.000,- terealisasi sebesar Rp. 885,833,500.00,- atau 95,63%. Dengan Realiasi fisik pada Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten sebesar 100 % Output sebagai bahan dokumen terkelolanya Sistem Layanan Informasi Promosi 100 % pada Tahun 2017 Outcam Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 90 Impac IPM 75,69, LPE 6,80, PPT 8,24 PPM 4,8, Dari 4 indikator Pemutakhiran Website kedepan sudah tidak diperkenankan karena kewenangan tersebut ada di Dinas Kominfo tetapi untuk pengelolaan boleh dilaksanakan. E-Kios masih ada kendala yaitu penempatan E-Kios di Kantor Badan Penghubung kurang mengenai sasaran karena survey kunjungan kurang maksimal, disamping itu belum on-line dan terintegrasi dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan kendala lain yaitu konten data E-Kios masih sederhana kurang mewarnai sehingga tampilan kurang menarik. dan Penempatan E-Kios harus ditempatkan pada tempat yang strategis. Indikator Tolok Ukur Publikasi Informasi mealalui Buletin masih tekendala yaitu sasaran belum maskimal, harusnya sasaran tersebut dapat tersampaikan pada seluruh OPD Provinsi Banten dan OPD Kabupaten/kota terkait serta Gubernur, Wagub, Sekda dan Komisi I sehingga hasil kinerja Badan Penghubung dapat terinformasikan kesetiap OPD ataupun masyarakat.

Indikator Tolok Ukur Publikasi melalui Booklet dikhususkan untuk media informasi di Bandara Soeta dan pelaksanaan ini masih harus

dikembangkan promosi ini bukan hanya di Bandara Soeta tapi bisa ditempat lain.

Indikator Publikasi kerjasama sama dengan media massa bisa dikembangkan dengan media massa nasional. Dari analisis capaian ataupun kendala masalah dari 5 indikator kinerja sasaran hasil kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- **Pemutakhiran Website dan E-Kios Badan Penghubung Provinsi Banten = 2 Bulan**

Kegiatan Pemutakhiran Website dan E-Kios Badan Penghubung Provinsi Banten memutakhirkan data dan menyajikan informasi serta konten yang lebih akurat dan sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi dilaksanakan dalam wpemutakhiran aktu 2 Bulan.

- **Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Buletin = 4 Edisi**

Sasaran dari Kegiatan Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Buletin adalah

1. Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2. DPRD Provinsi Banten
3. Anjungan Daerah seluruh Provinsi di TMII Jakarta
4. Kantor/Badan/Dinas Penghubung di Jakarta
5. Masyarakat umum khususnya pengunjung Anjungan Daerah Provinsi Banten di TMII.

- **Publikasi Informasi Provinsi Banten Melalui Booklet = 10.266 Exp**

Kegiatan Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet berlangsung selama 1 tahun yang dibagi menjadi 2 Kali cetak sebanyak 13.085 Exemplar, sedangkan untuk pengisian booklet kios informasi di Bandara Soekarno Hatta dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 hari. Untuk pengisian penyimpanan stok booklet dilakukan 2 hari sekali. Tempat Kegiatan di Jakarta dan di luar wilayah.



- **Publikasi Informasi Banten Melalui Kerjasama = 12 Bulan dan Penayangan berita di media massa Daerah/lokal = 2 Bulan**
Kegiatan Publikasi Informasi Banten melalui kerjasama penayangan berita di media massa

Sasaran pekerjaan ini untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi para Pejabat Negara, Tamu Negara, DPR RI, DPD RI, dengan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas kunjungan kerja ke Provinsi Banten serta memberikan Pelayanan fasilitasi Gubernur/Wakil Gubernur, DPRD serta unsur Muspida Provinsi Bante ten dalam rangka rapat kerja/kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Capaian sasaran pada Outcome yaitu meningkatnya pengelolaan layanan informasi promosi dengan target 100 % pada tahun 2017 sehingga meningkatnya capaian sasaran RPJMD, hal ini berdampak pada IPM,LPE, PPM,PPT sehingga dapat mempengaruhi Skala kepuasan Masyarakat

2). Indikator Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TOLOK UKUR DAN TARGET	%

			CAPAIAN PROGRAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum				
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100
	Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek	3 event	3 event	
	Partisipasi dalam HUT Banten	2 event	2 event	
	Pentas Seni di Event Nasional dan Regional	2 event	2 event	
	Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi dengan Mahasiswa Banten di Yogyakarta	1 event	1 event	
	Kegiatan Fasilitasi Forum Bisnis	1 event	1 event	

Pada tahun 2017 Kegiatan Promosi Produk Potensi Unggulan Daerah dan Investasi yang teranggarkan sebesar Rp. 589,395,000.- terealisasi sebesar Rp. 528,497,900,- atau 89,67%. Dengan Realiasi fisik pada Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah sebesar 100 % Output sebagai bahan dokumen terkelolanya Sistem Layanan Informasi Promosi 100 % pada Tahun 2017 Outcam Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 90 Impac IPM 75,69, LPE 6,80, PPT 8,24 PPM 4,8 dari 6 indikator Tolok Ukur yaitu :

- Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek = 3 event
- Partisipasi dalam HUT Banten = 2 event
- Pentas Seni di Event Nasional dan Regional = 2 event
- Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi dengan Mahasiswa Banten di Yogyakarta = 1 event
- Kegiatan Fasilitasi Forum Bisnis = 1 event

Analisis Capaian Kinerja Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek Pentas Seni di Event Nasional & Regional, kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan. Sasaran perencanaan kerja ini, belum ada tolak ukur kegiatan yang terkait dengan kegiatan promosi investasi yang sesuai, Pentas Seni dan Event Nasional & Regional akan dilakukan evaluasi dan koordinasi bersama dengan Dinas Pariwisata dan akan dilakukan MoU promosi dan publikasi dengan daerah/provinsi lain, serta Badan Penghubung Provinsi

lainnya. Apabila Badan Penghubung sebagai penyelenggara kegiatan ini, tidak memberikan penguatan terhadap Indikator Kinerja Utama dan Outcome. Tupoksi/peran Badan Penghubung pada kegiatan ini, yaitu tatakelola media informasi dan publikasi daerah untuk ke luar atau dari luar untuk Provinsi Banten, serta menjalin koordinasi yang efektif bersama mitra strategis; kedutaan, kementerian dan lembaga negara, serta perangkat daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pihak swasta.

Fasilitasi Promosi dan Investasi pada Badan Penghubung lebih kepada fasilitasi dan mendukung urusan , seperti fasilitasi ivent, investasi, promosi dan publikasi.

3). **Indikator Kinerja : Fasilitasi Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII**

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum				
Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100
			Paket Acara Khusus Anjungan Banten pada Rangkaian HUT Banten di TMII	100
			Festival Kuliner Khas Daerah dan Pameran Expo Nusantara	100
			Pawai Budaya Nusantara	100
			Gelar Citra Budaya Tradisi	100
			Parade Tari Nusantara	100
			Karnaval Prajurit	100
			Bulan Promosi 8 Kab/Kota di TMII	100
			Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan	100
			Rapat Koordinasi Kegiatan Anjungan Banten di TMII	100
			Partisipasi Pameran Nusantara Expo dan Forum di TMII	100
			Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan	100

Pada tahun 2017 Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII yang teranggarkan sebesar Rp. 743.000,000,- terealisasi sebesar Rp. 692,152,000,- atau 93,16%. Dengan Realiasi fisik pada Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan

di TMII sebesar 100 % Output sebagai bahan dokumen terkelolanya Sistem Layanan Informasi Promosi 100 % pada Tahun 2017 Outcam Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 90 Impac IPM 75,69, LPE 6,80, PPT 8,24 PPM 4,8.

Dari target capaian Tahun 2017 Anjungan Daerah masih kurangnya partisipasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk mengisi konten, ornament bahan materi untuk anjungan daerah Banten sehingga terkesan anjungan Banten belum mewakili isi tentang Banten berdampak pada efektivitas Anjungan Daerah sehingga akan berdampak juga pada setiap indikator . pada tahun 2017 indikator tolok ukur terdiri dari 11 Tolok Ukur yaitu :

- **Paket Acara Khusus Anjungan Banten pada Rangkaian HUT Banten di TMII = 1 kegiatan**

Paket Acara Khusus Anjungan Banten pada Rangkaian HUT Banten di TMII adalah partisipasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten yang berupa .pergelaran yang bersifat evaluative, apresiatif, kooperatif dan kompetitif.



- **Festival Kuliner Khas Daerah dan Pameran Expo Nusantara = 2 kegiatan**

Pameran kerajinan produk unggulan dan kuliner khas Banten yaitu Festival Kuliner dan Expo Nusantara dalam rangka HUT TMII.



- **Pawai Budaya Nusantara = 1 kegiatan**

Pawai Budaya bernuansa khas Daerah di Nusantara dalam kemasan arak-arakan atau pawai



- **Gelar Citra Budaya Tradisi = 1 kegiatan**

Pementasan Gelar Citra Budaya Tradisi Seni Budaya Banten yang berbentuk tari – tarian



- **Parade Tari Nusantara = 1 kegiatan**

Parade Tari Nusantara TMII adalah tampilan tari perpaduan kesenian khas Banten seperti calung renteng, karinding, kecapi,

biola, Terebang Gede, Beluk, Goong Patingtung, Gamelan salendro, Rebana Rudat dan dikolaborasi menjadi warna baru dalam garapan tari “NYALIN PARE” yang mengakar pada tradisi kesenian Banten.



- **Karnaval Prajurit = 1 kegiatan**

Karnaval Prajurit atau Arak-arakan dilaksanakan hari Minggu tanggal 19 November 2017 bertempat di Area Taman Mini Indonesia Indah.



- **Bulan Promosi 8 Kab/Kota di TMII = 4 kegiatan**

Bulan Promosi 8 Kab/Kota dilakukan oleh Kabupaten Kota di fasilitasi oleh Badan Penghubung Daerah di Anjungan Daerah TMII

- **Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan = 1 kegiatan**

Kegiatan Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan adalah berupa bimbingan latihan yang dilatih oleh Pelatih yang didatangkan langsung dari daerah bekerjasama dengan Sanggar-sanggar yang ada di Provinsi Banten. di laksanakan selama 11

Bulan selama setahun sedangkan Bulan Ramadhan dan idul Fitri latihan diliburkan, latihan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 14.00 wib.di Anjungan Banten TMII Jakarta



- **Rapat Koordinasi Kegiatan Anjungan Banten di TMII = 2 kegiatan**

Rapat Koordinasi Kegiatan Anjungan Banten bertujuan membahas untuk pengisian bulan Promosi di anjungan Banten selama 1 tahun, kegiatan tersebut berupa pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi dengan peserta sehingga terbentuklah hasil kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh peserta rapat berupa MoU, yang dilaksanakan hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB s/d selesai bertempat di Ruang Rapat Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten



- **Partisipasi Pameran Nusantara Expo dan Forum di TMII = 1 kegiatan**

Kegiatan Nusantara Expo & Forum merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik & Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilaksanakan pada pada Tanggal 19 s.d 23 Oktober 2017 berlokasi di Pelataran Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.



- **Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan = 12 kegiatan**
Penunjang Kegiatan adalah sarana, peralatan kantor untuk penunjang Anjungan Daerah Banten di TMII selama 1 (satu) tahun.

4). **Indikator Kinerja Kegiatan Pelayanan Masyarakat**

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum				
Pelayanan Masyarakat	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100
			Sarasehan Masyarakat Banten Se-Jabodetabek	100
			Pembinaan Mahasiswa Asal Banten dan Kongres Mahasiswa Banten	100

Pada tahun 2017 Kegiatan Pelayanan Masyarakat teranggarkan sebesar Rp. 385,505,000.00,- terealisasi sebesar Rp. 361,583,000,- atau 93,79%. Dengan Realiasi fisik pada Kegiatan Pelayanan Masyarakat sebesar 100 % Output sebagai bahan dokumen terkelolanya Sistem Layanan Informasi Promosi 100 % pada Tahun 2017 Outcam Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 90 Impac IPM 75,69 yang terdiri dari 3 Tolok Ukur yaitu :

- Sarasehan Masyarakat Banten Se-Jabodetabek = 1 dokumen
- Pembinaan Mahasiswa Asal Banten dan Kongres Mahasiswa Banten = 1 dokumen
- Kerjasama Kreatifitas Seni Budaya Mahasiswa = 1 dokumen

Kegiatan Pelayanan Masyarakat dengan Program Pembinaan dan Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemantapan Umum merupakan program yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) 2012 – 2017, dengan sasaran indicator Layanan Sistem Informasi dan Promosi Capaian sasaran pada Outcome yaitu meningkatnya pengelolaan layanan informasi promosi dengan target 100 % pada tahun 2017, dari 3 target tolok ukur telah dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu :

- Sarasehan di Twin Plaza Hotel tanggal, 18 November 2017
- Kongres Nasional Mahasiswa Banten dilaksanakan di gedung Jl.Asia Afrika Bandung ini dihadiri oleh Organisasi Mahasiswa kedaerahan Banten diantaranya IKMB Jakarta, KMC Jakarta, Kumala perwakilan Bogor, IKPML Yogyakarta, Kumala Perwakilan Sukabumi, HAMAS Serang, IMC Cilegon, Kumala Perwakilan Bandung, KAMAYASA Serang Bandung, Kumandang Bandung, KMC Bandung, IKMB Bandung

Dari Kegiatan tersebut ada beberapa kendala yang bermasalah jadwal kegiatan yang bergeser karena beberapa faktor yaitu Jadwal belum sinkron pihak penghubung dengan mahasiswa dan masyarakat.

Pada tolok ukur kegiatan Saresehan Masyarakat Banten se-Jabodetabek dengan sasaran peserta kelompok masyarakat Banten, Paguyuban Seni dan Budaya, Mahasiswa, dan Stakeholder lainnya yang berdomisili di Jakarta kegiatan tersebut belum ada tindaklanjut sebelumnya tentang hasil dari forum kegiatan yang strategis.

Kegiatan saresehan belum dianggap efektif selama kegiatan tersebut belum memberikan informasi dan promosi mengenai potensi ke-Bantenan, atau belum mengundang /menangkap minat besar investor berinvestasi di Banten serta menjaring kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dan harus dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan bersama Badan Penghubung atas kebutuhan kegiatan berkelanjutan dan strategis mendukung investasi pembangunan daerah melalui nota dinas kegiatan (intermediate outcome).

Tolok ukur kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mahasiswa Asal Banten. Konsep dan konteks pembinaan dan pemberdayaan Mahasiswa Banten di Jakarta yang belum jelas tingkat koordinasinya begitu juga Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi antara Mahasiswa Asal Banten yang belum Jelas juga koordinasinya.

Kegiatan pembinaan mahasiswa tidak berkaitan langsung dengan Tupoksi serta tidak memberikan pengaruh kuat terhadap Indikator Kinerja Utama dan Outcome Badan Penghubung Daerah. Kegiatan ini perlu dievaluasi dan dikoordinasikan bersama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kegiatan ini belum terukur dan tidak efektif karena tidak memberikan dampak capaian target RPJMD dan Renstra OPD 2017-2022. Hasil evaluasi kegiatan tersebut tidak mendukung indikator kinerja outcome Badan Penghubung. Permasalahan pada sasaran kegiatan ini akan dilakukan koordinasi bersama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) terkait sinkronisasi kegiatan agar tidak tumpang-tindih (overlapping).

Kegiatan Pelayanan Masyarakat substansinya seharusnya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang salah satunya adalah mahasiswa. Kegiatan pelayanan masyarakat seharusnya tidak di Tupoksi Promosi dan Investasi. Pelayanan masyarakat substansinya

langsung menyentuh kepada permasalahan masyarakat yang dilayani dan perlu dikoordinasikan dengan cepat dan ditindaklanjuti serta difasilitasi oleh OPD yang berhubungan dengan bidang urusannya, apakah mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, peluang investasi, kemudahan perizinan berusaha di Banten dan yang terkait dengan pelayanan publik lainnya). Terkait skema Tupoksi Badan Penghubung khususnya SOTK pada Hubungan Kelembagaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja outcomenya yaitu capaian presentasi kerjasama pembangunan akan dilakukan koordinasi bersama dengan Biro Organisasi mengenai Pergub Nomor 83 Tahun 2016, pada Tupoksi Badan Penghubung, serta menyiapkan koreksi dan usulan konsep tupoksi dan uraian tugas ideal Badan Pengubung Daerah Provinsi Banten. Selain itu, Pada kegiatan pelayanan informasi dan promosi perlu membuat peta koordinasi, SOP dan media stratetegis informasi bersama perangkat daerah lainnya, serta agar dilakukan evaluasi oleh Badan Penghubung terhadap jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyrakat sesuai kebutuhan dan permasalahannya, serta membuat/menyiapkan desain media informasi potensi keBantenan yang efektif dan dapat diakses cepat oleh masyarakat dan mitra strategis / stakeholder Badan Penghubung.

5. Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum				
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100	Sistem Layanan Promosi dan Informasi	100
			Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu	100
			Fasilitas Event Nasional/Internasional, Kerjasama Pemda Kegiatan Kementerian	100

Pada tahun 2017 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang teranggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 189,088,810,- atau 94,54%. Dengan Realiasi fisik pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 100 % Output sebagai bahan dokumen terkelolanya Sistem Layanan Informasi Promosi 100 % pada Tahun 2017 Outcam Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 90 Impac IPM 75,69 yang terdiri dari 3 Tolok Ukur yaitu :

- Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu = 12 bulan
- Fasilitas Event Nasional/Internasional, Kerjasama Pemda Kegiatan Kementerian = 4 kegiatan
- Fasilitas Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu pada Even Nasional Kerjasama Pemda, Kegiatan MPU, APPSI dan Lainnya = 1 kegiatan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah berbasis kinerja sebagai langkah tindak lanjut tugas dan fungsi Subbid Penyelenggaraan Pemda dalam melaksanakan kegiatan. Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017 yaitu :

- Melaksanakan fasilitas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah di luar daerah Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitas apabila diminta oleh DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Banten di Jakarta;
- Melaksanakan fasilitas Kementerian/lembaga ke Banten;
- Mengoordinasikan kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

Kegiatan Layanan Event Nasional dan Internasional Terhadap Pejabat Pimpinan Daerah/Pusat, Tamu dan Kegiatan MPU dan APPSI pada Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu Badan Penghubung melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap pimpinan baik di Jakarta maupun ke luar Daerah, serta menyelenggarakan dan memfasilitasi pentas seni dan budaya Banten yang belum selaras dengan tupoksi Badan Penghubung yang

sebenarnya merupakan tupoksi yang sama dengan Biro ARTP.

Implementasi kegiatan Layananan Event Nasional dan Internasional Terhadap Pejabat Pimpinan Daerah/Pusat, Tamu dan Kegiatan MPU dan APPSI pada Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat kesamaan operasional dalam pelayanan terhadap pimpinan daerah yaitu pada pelayanan keprotokolan. Hal ini tidak memberikan pengaruh kuat terhadap capaian kinerja utama dan kinerja outcome Badan Penghubung. Implementasi dan operasional kegiatan tersebut lebih mendukung kepada kinerja kegiatan /output Biro Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan (ARTP). Outcome dari implementasi kegiatan ini akan dilakukan dievaluasi, sebagaimana PP Nomor 18 tahun 2016 peran Badan Penghubung Daerah melakukan peran koordinasi antara pemerintahan daerah dan pusat, tidak melakukan tupoksi keprotokolan dan pelayanan langsung kepada pimpinan daerah.

C. Akuntabilitas Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja merupakan hasil perhitungan untuk melihat perkembangan suatu pekerjaan (kegiatan) dibandingkan dengan target yang hendak dicapai atau perkembangan periode sebelumnya yang biasanya dilambangkan dengan angka persentase/indek/rasio atau klasifikasi dengan skala ordinal dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat evaluasi kemajuan pekerjaan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan/program kedepan.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan umum belanja daerah merupakan langkah–langkah yang ditempuh untuk mengefisiensikan dan mengefektifitaskan belanja tidak langsung dan belanja langsung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan program pembangunan yang telah dijabarkan.

Langkah–langkah kebijakan yang akan ditempuh, antara lain :

- a. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung diarahkan se-efisien mungkin berdasarkan kebutuhan aktivitas pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang peruntukannya diarahkan tepat sasaran, berskala prioritas tinggi, mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendorong kelancaran penyelenggaraan program pembangunan fisik dan sumber daya manusia;
- c. Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk memperkuat kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dan belanja bantuan keuangan yang diarahkan untuk meningkatkan program dan kegiatan urusan wajib;
- d. Menyiapkan anggaran belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- e. Belanja langsung diprioritaskan pada (a) kegiatan yang mendesak, (b) berdampak luas, (c) yang berkaitan langsung pada kegiatan penanganan kemiskinan, (d) pemberdayaan petani, nelayan dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan (e) membuka kesempatan kerja yang luas untuk mengatasi pengangguran;
- f. Mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian agenda daerah.

2. Target dan Realisasi Belanja

Badan Penghubung Provinsi Banten terdapat Pendapatan Retribusi Daerah berupa pendapatan retribusi dari sewa kamar wisma Banten. Target retribusi dari Wisma Banten pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 113.000.000,- , tidak ada perubahan target retribusi pada tahun 2017. Jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. Rp. 90.850.000,- atau 80,40% dari target retribusi yang direncanakan dalam APBD.

Anggaran Belanja Tahun 2017 sebesar Rp. 11.913.240.000,- sedangkan Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 12.526.240.000,-. Anggaran Belanja terbagi dua yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2017 sebesar Rp. 4.149.000.000,- sedangkan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Perubahan sebesar Rp. 4.762.000.000,-. Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2017 sebesar Rp. 7.764.240.000,- sedangkan anggaran Belanja Langsung (BL) Perubahan sebesar Rp. 7.764.240.000,-. Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Anggaran perubahan belanja pegawai pada Belanja Langsung (BL) Tahun 2017 sebesar Rp. 54.500.000,- , anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 7.476.440.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 233.300.000,-.

Realisasi Belanja Tahun 2017 sebesar Rp. 11.272.168.268,- atau 89,99%. Realisasi Belanja terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan realisasi Belanja Langsung (BL). Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2017 sebesar Rp. 4.396.884.301,- atau 92,33%. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 6.875.283.967,-. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 53.200.000,-; realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.590.883.967,-; sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp. 231.200.000,-. Realisasi anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAP dan Permendagri 30 (terdapat pada lampiran LRA).

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target realisasi Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan. Berikut ini rekapitulasi realisasi kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2017 :

1. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 4,762,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 4,396,884,301,- atau 92,33%.
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dianggarkan sebesar Rp. 60,672,000,- terealisasi sebesar Rp. 56,913,000,- atau 93,80%.
3. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan sebesar Rp.171,000,800,- terealisasi sebesar Rp. 124,227,200,- atau 72,64%.
4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan sebesar
5. Rp. 233,300,000,- terealisasi sebesar Rp. 231,200,000,- atau 99,09%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan sebesar
- Rp. 381,875,000,- terealisasi sebesar Rp. 364,691,910,- atau 95,50%.
7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dianggarkan sebesar Rp.1,946,674,200,- terealisasi sebesar Rp. 1,807,811,151,- atau 92,87%.
8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dianggarkan sebesar Rp. 44.682.000,- terealisasi sebesar Rp. 39,433,000,- atau 88,25%.
9. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1,986,350,000,- terealisasi sebesar Rp. 1,505,092,496,- atau 75,77%.
10. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 385,505,000,- terealisasi sebesar Rp. 361,583,000,- atau 93,79%.

11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 200,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 189,088,810,- atau 94,54%.
12. Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten dianggarkan sebesar Rp. 926,286,000,- terealisasi sebesar Rp. 885,833,500.00,- atau 95,63%.
13. Kegiatan Promosi Produk Potensi Unggulan Daerah dan Investasi dianggarkan sebesar Rp 589,395,000,- terealisasi sebesar Rp. 528,497,900,- atau 89,67%.
14. Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII dianggarkan sebesar Rp. 743,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 692,152,000,- atau 93,16%.
15. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 95,500,000.00,- terealisasi sebesar Rp. 88,760,000,- atau 92,94% .

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 11.040.968.268,- atau 89,92% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 12.292.940.000,-. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.396.884.301,- atau 92,33% dari anggaran sebesar Rp. 4.762.000.000,-. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

- Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 realisasi sebesar Rp. 4.396.884.301,- atau 92,33% dari anggaran perubahan BTL sebesar Rp. 4.762.000.000,-.
- Belanja Pegawai Langsung tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 53.200.000,- atau 97,61% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 54.500.000,-. Belanja Pegawai Langsung digunakan untuk pembayaran pegawai berupa honorarium kegiatan.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 6.644.083.967,- atau 88,22% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 7.530.940.000,-.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal tahun 2017 adalah sebesar Rp. 231.200.000,- atau 99,10% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 233.300.000,-.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 adalah sebesar Rp 231.200.000,- dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin perubahan sebesar Rp. 233.200.000,-. Belanja Modal Peralatan dan mesin berupa :

Pengadaaan Alat rumah tangga lainnya (*home use*)
 Pengadaan komputer

Tabel IV .

Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Banten

No	Uraian	Anggaran Perubahan 2017	Realisasi Tahun 2017	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Peralatan dan Mesin	233.300.000,00	231.200.000,00	99,10%
2	Belanja Gedung dan Bangunan	00,00	00,00	0%
3	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	00,00	00,00	0%
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	00,00	00,00	0%
5	Belanja Aset Lainnya	00,00	00,00	0%



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 menyajikan tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Dalam perumusan kebijakan, sangat disadari bahwa sulit untuk memprediksi jumlah kebijakan yang akan ditetapkan dalam satu tahun berjalan. Begitu juga kebijakan dengan penganggaran kinerja yang selalu tidak sejalan dengan perencanaan, upaya ini sifatnya berkesinambungan guna menyiapkan berbagai landasan hukum bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik juga sistem penganggaran masih menggunakan prioritas kegiatan disaat penentuan kesepakatan KUA dan PPAS. Selain itu, penyusunannya melibatkan berbagai stakeholders baik internal maupun eksternal Badan Penghubung serta Eksternal pemerintah (Mahasiswa/Perguruan Tinggi, Masyarakat/ pakar/ praktisi, LSM, Paguyuban, DPRD Provinsi Banten dan lain-lain);
2. Belum sesuainya Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pergub 83 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Penghubung yang belum ideal sebagaimana dengan Badan Penghubung lainnya sehingga berdampak pada pembagian tugas tidak merata;
3. Belum pahamnya Tufoksi baru sehingga sulit menentukan Indikator Kinerja kegiatan dengan demikian hasil kegiatan belum

bisa diyakini capaian Outcam dan Impecnya yang sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan;

4. Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
5. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
6. Belum Terlihatnya dan terlaksananya Fungsi dan Peranan Badan Penghubung sebagai pusat informasi Badan Banten di Jakarta yaitu sebagai penyerap informasi pusat dan daerah;
7. Belum Optimalnya kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder ;
8. Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
9. Belum ada data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
10. Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jatidiri Provinsi Banten;
11. Badan Penghubung sebagai Objek Pelayanan Masyarakat dan Pimpinan Akan Tetapi masih belum menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat;
12. Pada Kegiatan Sarasehan belum ada tindak lanjut nota dinas kegiatan;
13. Konsep Pembinaan mahasiswa belum sesuai dengan tujuan dan masalah dan Tufoksi serta PP 18 Tahun 2016

B. Saran

1. Dalam rangka mempertegas fungsi peranan Badan Penghubung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Penghubung Daerah sehingga dapat lebih efektif memfungsikan terhadap Promosi, Informasi, Koordinasi dan Fasilitasi pimpinan sebagai bentuk memenuhi tuntutan berbagai kalangan.
2. Perlu diusulkan kembali penyesuaian Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pergub 83 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Penghubung agar lebih ideal

sebagaimana dengan Badan Penghubung lainnya sehingga pembagian tugas lebih merata;

3. Perlu dilakukan konsultasi dengan OPD, Kementerian yang terkait untuk memahami Tufoksi baru sehingga dapat menentukan Indikator Kinerja kegiatan dengan demikian hasil lebih terarah dalam capaian Outcam dan Impecnya yang sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan;
4. Perlu dibangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan;
5. Badan Penghubung harus menyusun SOP semua Kinerja
6. Belum Terlihatnya dan terlaksananya Fungsi dan Peranan Badan Penghubung sebagai pusat informasi Badan Banten di Jakarta yaitu sebagai penyerap informasi pusat dan daerah;
7. Belum Optimalnya kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder ;
8. Perlu menyusun data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
9. Perlu di bangun data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
10. Ke depan perlu adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jatidiri Provinsi Banten;
11. Ke depan Badan Penghubung perlu adanya Survey Kepuasan Masyarakat.
12. Perlu dibuat Nota Dinas tindak lanjut hasil narasumber Instrumen sebagai bahan perencanaan kegiatan saresehan dan pengendalian dan evaluasi kegiatan. Sehingga ada kesinambungan pertemuan. Topik / Tema yang berkaitan dengan tupoksi / IKU Badan Penghubung
13. Konsep dan konteks pembinaan mahasiswa oleh Badan Penghubung, dan regulasi. Evaluasi kegiatan pembinaan mahasiswa? Kaitannya dengan tupoksi Badan Penghubung. Saran : memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang salah satunya adalah mahasiswa

